

TAK GUNAKAN OBAT SIRUP PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT

Dinkes Sleman Pilih Gunakan Obat Generik

SLEMAN (KR) - Kepala Dinas Kesehatan Sleman dr Cahya Purnama MKes menegaskan, di Gudang Farmasi Sleman atau di Gedung Pengelolaan Obat dan Alat Kesehatan (POAK) tidak ditemukan obat-obat sirup yang terindikasi bahan kimia penyebab gagal ginjal akut. Bahkan obat-obatan yang diberikan di Puskesmas di Kabupaten Sleman juga tergolong aman dan tidak tercemar oleh bahan kimia ethylene glycol, diethylene glycol, dan ethylene glycol butyl ether (EGBE).

"Alhamdulillah di Gudang Farmasi Sleman atau di Gedung Pengelolaan Obat dan Alat Kesehatan (POAK), tidak ada obat-obat sirup yang terindikasi, sedangkan yang kita pakai itu ialah generik. Jadi hanya satu, termasuk layanan di Puskesmas menggunakan layanan esensial dari POAK atau dari distribusi yang kita berikan dari kabupaten. Sehingga sampai sekarang belum ada sirupnya yang teridentifikasi," ungkap Kepala Dinas

Kesehatan Sleman dr Cahya Purnama kepada wartawan, kemarin terkait kasus gagal ginjal akut yang terjadi akhir-akhir ini. Cahya juga menyebutkan bahwa sebenarnya setiap obat itu ada uji klinis fase satu, fase dua, dan dari Balai POM melakukan pengujian obat-obatan yang sudah beredar di pasaran, yang disebut monitoring efek samping obat atau meso. Hasil pengujian tersebut dapat diakses melalui website pada laman

<https://e-meso.pom.go.id>. Melalui website tersebut dapat diamati obat-obatan atau obat sirup apa saja yang ditarik.

Dijelaskan Cahya, sejauh ini telah dilakukan investigasi oleh pemerintah melalui Kemenkes dan BPOM terkait kasus gagal ginjal akut. Obat sirup yang disinyalir menyebabkan penyakit gagal ginjal akut ini mengandung pencemaran zat kimia berbahaya yaitu ethylene glycol, diethylene glycol, dan ethy-



dr Cahya Purnama

lene glycol butyl ether (EGBE).

"Zat kimia tersebut sebenarnya sama sekali tidak diperkenankan sebagai bahan-bahan dimakanan ataupun diobat. Karena jika diminum dalam jangka waktu tertentu akan berproses menjadi

semacam infeksi atau semacam keracunan obat, yang menyebabkan tersumbatnya saluran ginjal kemudian menjadi gagal ginjal. Penyakit gagal ginjal akut pada anak ini ditandai dengan gejala kurangnya produksi urine. Bahkan sampai tidak bisa buang air kecil sama sekali," jelasnya.

Hal senada dijelaskan Dokter Spesialis Anak RSUD Sleman dr Raden Yuli Kristianto Sp.A, Menurutnya, terkait dengan obat-obatan sirup yang menyebabkan gagal ginjal dengan mengonsumsi obat sirup sebenarnya bukan komponen di dalamnya. Tetapi pelarutnya yang menggunakan ethylene glycol dan diethylene glycol. Di Indonesia saat ini BPOM melakukan penyelidikan

obat-obat apa saja yang mengandung ethylene glycol dan diethylene glycol. Telah keluar hasil sementara bahwa ada beberapa obat di Indonesia yang mengandung ethylene glycol dan diethylene glycol.

"Jadi sebaiknya masyarakat tetap menunggu hasil BPOM sampai final, serta diminta untuk tidak melakukan selfmedicating dengan obat-obatan sirup. Meningkatkan kewaspadaan orangtua pada kondisi anak sakit, dengan memantau urine. Jika produksi urinenya turun atau bahkan tidak buang air kecil selama 6 jam, orangtua diminta untuk tidak cemas, dan tidak panik, namun segera konsultasikan kepada dokter," tutur Raden Yuli. (Has)-f

YAKKUM Ajak Pahami Kesehatan Jiwa Masyarakat

SLEMAN (KR) - Memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia (HKJS) tahun 2022 yang jatuh pada tanggal 10 Oktober, Pusat Rehabilitasi YAKKUM bekerjasama dengan Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma (USD) mengadakan Kuliah Umum terkait Rehabilitasi Kesehatan Jiwa berbasis Masyarakat di kampus setempat, Sabtu (22/10). Kuliah diikuti 400 mahasiswa mata kuliah psikologi abnormal dan dasar-dasar intervensi, dibuka Proyek Manager Kesehatan Jiwa Masyarakat Pusat Rehabilitasi YAKKUM Siswiningtyas SSos dan Dekan Fakultas Psikologi USD Dr Yohannes Babbista Cahya Widiyanto MSi.

Kuliah umum menghadirkan 4 pembicara yang telah berpengalaman di bidan-

nya. Seperti Psikolog Puskesmas Godean 1 Siam Hanifah SPsi, Desty Endah SPd selaku dampingan disabilitas psikososial, Angga A Praptantya SPsi selaku Project Monitoring Evaluation Program Kesehatan Jiwa berbasis Masyarakat, dan Veny Septiana SPsi selaku Tim Diklat Pusat Rehabilitasi YAKKUM.

Sementara Siswiningtyas menyebut kuliah umum ini mengenalkan bagaimana peran psikologi, selain layanan primer kesehatan tapi juga untuk komunitas. "Kami akhirnya ke kampus supaya tersampaikan peran mahasiswa di masyarakat dalam hal psikologi. Ini rangkaian dari road show HKJS dan ini kegiatan terakhir," tandasnya. (Has)-f

HADAPI DIGITALISASI PENDIDIKAN Guru Dituntut Lakukan Transformasi

SLEMAN (KR) - Indonesia telah memasuki era digitalisasi merdeka belajar. Era digitalisasi merdeka belajar menuntut untuk siswa mempunyai kemampuan dalam hal teknologi namun juga kemampuan literasi

dan numerasi.

Hal tersebut disampaikan Meita Fitriyanawati MPd, Ketua Pelatihan, dosen Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) di Aula SD Muhammadiyah

Gendol 1 Tempel Sleman, Sabtu (22/10) dalam Pelatihan Optimalisasi Keterampilan Guru Sekolah Dasar dalam menghadapi digitalisasi pendidikan di era merdeka belajar. Kegiatan dibuka Kepala SD Muhammadiyah Gendol 1 Banun Rohyatiningih, menghadirkan narasumber Muhamad Ragil Kurniawan MPd, selaku Kepala Bidang Kemasyarakatan Lembaga Pengembangan Studi Islam (LPSI) UAD dan Nurul Hidayati Rofiah PhD.

Menurut Ragil Kurniawan, dunia pendidikan sudah memasuki era baru, yakni digital merupakan bagian keseharian dari kehidupan. (Jay)-f



Ragil Kurniawan MPd menyampaikan materi literasi era merdeka belajar.

DICATAT DALAM REKOR MURI IDI Sleman Aksi Donor Darah

SLEMAN (KR) - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sleman mengadakan aksi donor darah di Kantor Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Sleman, Selasa (25/10). Aksi donor darah dalam rangka HUT ke-72 IDI ini dihadiri Bupati Sleman Kustini.

"Dalam rangkaian HUT ke-72, seluruh IDI se-Indonesia yang diinisiasi oleh pengurus pusat IDI melaksanakan aksi donor darah secara serentak. Dalam hal ini, IDI Sleman bekerjasama dengan PMI Kabupaten Sleman," ungkap Ketua IDI Kabupaten Sleman Rino Rusdiono.

Menurutnya, kegiatan



Bupati menghadiri aksi donor darah IDI Sleman.

yang mengusung tema 'Berbakti Untuk Negeri, Mengabdikan Untuk Rakyat' menyasar keikutsertaan para dokter dan masyarakat umum dalam aksi do-

nor darah yang nantinya akan dicatat dalam rekor MURI aksi donor darah yang diikuti dokter di seluruh Indonesia. "Ada sejumlah kegiatan sosial

yang dilakukan IDI Sleman, di antaranya pemeriksaan mata, operasi katarak, khitanan massal dan bakti sosial," ujar Rino.

Sementara Bupati Kustini menyebut, aksi donor darah yang diinisiasi oleh IDI Cabang Sleman ini mempermudah para pendonor yang ingin menyumbangkan darahnya bagi kemanusiaan. "Aksi donor darah ini selain untuk mendukung pemecahan Rekor MURI, saya berharap juga dapat memotivasi masyarakat luas untuk secara rutin mendonorkan darahnya," katanya. (Has)-f

Musyawarah Rayon Badko TKA TPA Ngemplak

SLEMAN (KR) - Badan Koordinasi (Badko) Taman Kanak-kanak Alquran (TKA) dan Taman Pendidikan Alquran (TPA) Kapanewon Ngemplak Sleman menggelar Musyawarah Rayon (Musyran) VIII di Aula SMP Negeri 1 Ngemplak, Minggu (23/10). Kegiatan diikuti oleh 100 ustadz-ustadzah utusan dari 41 Unit TKA-TPA se-Kapanewon Ngemplak.

Joko Sutanto kembali terpilih sebagai Ketua Umum Badko TKA-TPA Rayon Ngemplak periode 2022-2026 melalui pemilihan secara e-voting dan hasil penetapan dari sidang formatur dengan musyawarah mu-

fakat. Joko Sutanto berharap dukungan pemangku kebijakan baik dari pemerintah kapanewon, kalurahan, instansi dan lembaga terkait, takmir masjid dan unit TKA-TPA, untuk lebih menumbuhkembangkan TKA-TPA di Kapanewon Ngemplak.

"Saya berharap dengan dukungan tersebut, program kerja untuk 4 tahun mendatang dapat berjalan dengan lebih baik dalam satu lingkup visi bersama satu tujuan mewujudkan generasi Qurani menyongsong masa depan yang gemilang," katanya.

Ketua panitia Rahmad Riyadi me-

nuturkan, Musyran ini dimaksudkan sebagai media untuk mengkoordinir, membina, meningkatkan profesionalisme dan kualitas pengelolaan TKA-TPA. Selain itu sebagai wahana untuk menumbuhkan semangat kebersamaan dalam gerakan memasyarakatkan Alquran.

Menurutnya kegiatan ini juga bertujuan sebagai sarana untuk melaporkan pertanggungjawaban (LPJ) pengurus periode 2016-2022 dan sebagai sarana untuk memilih kepemimpinan yang baru periode 2022-2026 sekaligus membuat program kerjanya untuk 4 tahun yang akan datang. (Dev)-f



DPRD KABUPATEN SLEMAN SUARA WAKIL RAKYAT

Jl. Parasamya, Tridadi, Sleman, DIY Kode Pos 55511. Telp. (0274)868413, Fax (0274)868413

KINERJA KOMISI A DPRD KABUPATEN SLEMAN

Perketat Pengawasan Izin Tempat Hiburan Hingga Restoran



Ani Martanti ST

SLEMAN (KR) - Komisi A DPRD Sleman mendorong eksekutif untuk memperketat pengawasan perizinan tempat hiburan, kafe hingga restoran. Jangan sampai menjamurnya tempat hiburan, kafe dan restoran ini tidak berdampak positif terhadap Pemkab Sleman, khususnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sleman Ani Martanti

ST mengatakan, sebagai daerah tujuan wisata, di Sleman banyak bermunculan tempat hiburan, kafe hingga restoran. Hal ini menunjukkan potensi ekonomi Kabupaten Sleman cukup tinggi.

"Kenapa para investor mau membuka tempat hiburan, kafe maupun restoran di Sleman, karena potensi pasarnya cukup bagus. Apalagi di Sleman ini juga banyak mahasiswa yang kuliah," kata Ani Martanti, Selasa (25/10).

Sebagai wilayah yang memiliki potensi ekonomi yang bagus ini, menurut Ani, Pemkab Sleman harus juga mengimbangi dengan pengawasan perizinan dari tempat hiburan, kafe dan restoran. Ketika tidak memiliki izin, Pemerintah Daerah nantinya yang akan dirugikan.

"Kami minta eksekutif memperketat pengawasan terhadap izin tempat hiburan, kafe dan restoran. Inventarisasi dulu, kemudian tim kolaborasi yang terdiri dari beberapa OPD itu turun ke lapangan mengecek izinnya, apakah sudah berizin atau belum," ucap anggota

DPRD dari Fraksi PKB ini.

Jika ditemukan yang belum izin atau izinnya tidak sesuai peraturan, eksekutif memberikan surat peringatan terlebih dulu dan meminta pihak pengelola untuk mengurus perizinan. Bahkan jika perlu, tim kolaborasi tersebut memberikan pendampingan bagi pengelola untuk mengurus izin.

"Kalau memang belum punya izin, silakan berikan kesempatan untuk mengurus izin. Termasuk memberikan pendampingan supaya para pengelola juga merasa

dibantu pemerintah daerah dalam mengurus. Sehingga tidak terkesan hanya menertibkan saja, tapi juga memberikan solusi," kata warga Pakem ini.

Ketika sudah diberikan kesempatan untuk mengurus, namun tidak ada tindakan atau niat baik dari pengelola, Pemkab Sleman harus bersikap tegas dengan cara menutup tempat tersebut. Hal itu untuk memberikan efek jera bagi pengelola yang tidak mau mengurus izin.

"Jangan sampai Pemkab Sle-

man terkesan tebang pilih saja. Tapi harus bertindak tegas bagi mereka yang tidak tertib izin. Ketika izin tertib, tentu PAD Sleman akan meningkat. Ketika PAD besar, otomatis pembangunan Sleman akan cepat sehingga bisa menyejahterakan masyarakatnya," tuturnya.

Hal senada juga dikatakan Anggota Komisi A DPRD Sleman lainnya Dra Hj Sri Haryani MSi. Menurutnya, dalam melakukan pengawasan dan penertiban perizinan itu tidak boleh langsung menutup usaha yang tidak berizin. Namun pemerintah daerah bisa memberikan peringatan dan memberikan kesempatan untuk mengurus izin.

"Peringatan itu harus dilakukan. Setelah itu, mereka diberikan kesempatan untuk mengurus izinnya dan jika perlu diberikan pendampingan. Tapi kalau diberikan kesempatan itu tidak dimanfaatkan dengan baik, ya silakan ada tindakan tegas berupa penutupan," tegas Sri Haryani.

Di samping izin operasional, ek-



Dra Hj Sri Haryani MSi

sekutif juga perlu mengecek apakah menjual minuman alkohol atau tidak. Jika menjual minuman alkohol, tempat hiburan maupun kafe harus dipastikan mempunyai izin menjual miras. "Kalau ada yang menjual minuman alkohol tapi tidak mempunyai izinnya, ya harus distop dulu jualanannya. Sampai mereka mengantongi izin jual minuman beralkohol," pinta anggota legislatif dari Fraksi PDI Perjuangan ini. (Sni)-f



Komisi A saat rapat dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).